

Analysis of Village Government Performance in Improving the Welfare of MSME Actors in Laut Dendang Village

Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Desa Laut Dendang

Yuliana Pida ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ yulianapida84@gmail.com, ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Pida, Y., Sudiarti, S. (2022). Analysis of Village Government Performance in Improving the Welfare of MSME Actors in Laut Dendang Village. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [23 Agustus 2022]

Revised [26 September 2022]

Accepted [10 Oktober 2022]

KEYWORDS

Performance; Village government; MSMEs

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

UMKM merupakan sektor informal yang kontribusinya besar bagi perekonomian bangsa. Dan pemerintah desa merupakan pemerintahan yang paling dekat keberadaannya dengan masyarakat dan bersinggungan langsung terkait dengan permasalahan UMKM. Sehingga kinerja pemerintah desa dalam menangani UMKM merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisa kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara eksklusif, observasi langsung dilapangan serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja pemerintah desa yang diukur dengan menggunakan lima indikator yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas secara menyeluruh telah terlaksana dengan baik. Namun yang perlu menjadi penekanan ialah aspek produktivitas yang belum tampak hasilnya secara signifikan namun tetap menunjukkan perkembangan yang positif.

ABSTRACT

MSMEs are the informal sector which contributes greatly to the nation's economy. And the village government is the government that is closest to the community and is directly related to MSME problems. So that the performance of the village government in dealing with MSMEs is an interesting topic to study. This study aims to identify and analyze the performance of the village government in improving the welfare of MSME actors in Laut Dendang Village. The analysis was carried out using qualitative methods. Data were obtained through exclusive interviews, direct field observations and documentation. Data analysis was done by triangulation method. The results of the study indicate that the performance of the village government as measured by using five indicators namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and overall accountability has been carried out well. However, what needs to be emphasized is the productivity aspect which has not shown significant results but still shows positive developments.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan kegiatan usaha masyarakat yang mampu menopang perekonomian nasional, memperluas lapangan pekerjaan, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat (Arjawa & Senimantara, 2022). Selain itu UMKM sangat berperan dalam menangkis krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tak hanya itu UMKM dalam menggerakkan pertumbuhan serta kemajuan ekonomi daerah (Fitriana & Eprilianto, 2022). Perlunya dukungan, dorongan dan kesempatan bagi UMKM untuk terus mengembangkan, memperluas serta meningkatkan performa atau kinerja para pelaku UMKM. Selain itu para pelaku UMKM perlu meningkatkan performa, pengetahuan, sikap pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi resiko, kemudian perlunya etos kerja yang tinggi untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Upaya untuk memperkuat perekonomian nasional dan daerah dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh UMKM. Dalam hal ini perlu adanya kesempatan dan dukungan dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi dan mendampingi perkembangan UMKM guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah (Maulida & Ahmad, 2017).

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memiliki karakteristik yang kurang lebih sama di setiap daerah, seperti tingkat pendapatan rendah dan manajemen yang buruk, dan dalam beberapa kasus usaha mikro dan kelompok usaha kecil di bidang-bidang seperti gizi, pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak dikelola dengan baik. Usaha mikro dan UKM yang pada umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, bukan merupakan badan hukum tetapi secara formal didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang menggunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal dan berperan penting dalam perekonomian nasional. UMKM biasa juga dikenal dengan ekonomi sektor informal, underground economy atau extra legal sektor (Harahap, 2018).

UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (Sarfhah, Atmaja, & Verawati, 2019). Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk besar dibanding negara lainnya sejak tahun 2014. Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan dari tahun 2015 hingga 2017, yang salah satu pemicunya adalah tingginya usia produktif dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 1997-1998, UMKM mampu membuktikan tetap berdiri kokoh (Putra, 2018). Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan pasca krisis ekonomi 1997-1998 itu, jumlah UMKM justru meningkat bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Ditinjau dari pertumbuhannya, tahun 2016 pertumbuhan UMKM meningkat 4,17% dari 34,64% menjadi 38,81% sementara usaha besar justru mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68% ("Badan Pusat Statistik," n.d.). Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pasca krisis 1998.

Desa Laut Dendang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang. Bukan hanya secara nasional tetapi juga tingkat local UMKM mengalami pertumbuhan yang positif. Usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat ini baik dibidang kerajinan, kuliner dan industry rumahan kian terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang harus memutar otak untuk tetap bisa survive dengan perkembangan teknologi serta seperti sekarang ini dan meningkatnya pesaing dikalangan mereka. Untuk itu dukungan baik bersifat riil maupun materil dari pemerintah terutama pemerintah desa yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. dukungan ini dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk tetap survive dengan berbagai resiko dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan dari observasi sementara dilapangan bahwasanya Kantor Desa Laut Dendang turut memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal untuk mensejahterakan para pelaku UMKM tetapi belum terkelola dengan baik dan juga para pelaku

UMKM mengalami kesulitan dalam masalah pemasaran produk yang para UMKM jual. Permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan seharusnya. Jika hal ini diatasi tentunya menimbulkan suasana nyaman dan kondusif sehingga para pelaku UMKM dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan optimal. Maka penting penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam memberikan dukungan bagi perkembangan pelaku UMKM di wilayah pemerintahan Desa Laut Dendang. Hal bertujuan untuk kemudian diberikan rekomendasi atau kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM menuju pada arah yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

Definisi Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000) dalam penelitian (Andika & Tarigan, 2013) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka, dalam melakukan suatu aktivitas hendaklah bersungguh-sungguh atau tekun, karena dampak dalam suatu kinerja akan berpengaruh penuh dengan prestasi yang akan dicapai. Mahoney et al.(1965) mendefinisikan kinerja manajerial berdasarkan beberapa fungsi manajemen yaitu seberapa jauh manager mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut yang meliputi: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan. Pengertian kinerja instansi pemerintah menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan (Rulyanti, Sularso, & Sayekti, 2017).

Definisi indikator kinerja menurut Dwiyanto dalam penelitian (Kusnaendar, 2018), menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Produktivitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.

Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rosalina, 2013).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang no 20 tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ("UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah [JDih BPK RI]," n.d.).

Usaha-usaha mikro kecil umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak berbadan hukum, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumberdaya lokal dan tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional sehingga sering disebut dengan sektor informal, underground economy atau extra legal sector (Harahap, 2018). Pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. Mereka tidak pernah menuntut macam-macam dari pemerintah, kecuali untuk masalah legalitas, jaminan keamanan, pengayoman, serta birokrasi yang sederhana dengan biaya yang murah (Wauran, 2012).

UMKM memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur perekonomian nasional (Hidayah, Mulatsih, & Purnamadewi, 2019). Jika UMKM berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh UMKM akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tetapi jika UMKM tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan akhirnya berakibat pada terjadinya krisis ekonomi (Harahap, 2018).

Peran Pemerintah Dalam UMKM

Soerjono Soekanto (2002) dalam penelitian (Nirwana, Muhammadiyah, & Hasanuddin, 2017), berperan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Apabila diamati berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Maka atas dasar definisi yang telah diungkapkan di atas pemerintah mempunyai kewenangan terhadap apa-apa yang berada diwilayah kekuasaannya. Maka dari itu keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit ataupun sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan kepada UMKM. Untuk lebih jelasnya peran pemerintah terhadap UMKM terbagi kedalam beberapa skema yakni peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan serta peran teknis (Ondang, Singkoh, & Kumayas, 2019). Dimana peran fasilitatif ialah peran pemerintah dalam

memberikan fasilitas dalam mendorong peningkatan kinerja UMKM, baik dalam pemasaran proses produksi dan lain sebagainya. Peran ini dapat berbentuk pemberian fasilitas dalam mempromosikan produk atau hasil usaha. Lalu peran edukasional, dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk memberikan serta menambah pengetahuan ataupun pemahaman para pelaku UMKM dalam mengelola, memasarkan produk yang baik. Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kinerja pelaku UMKM. Selanjutnya peran representatif, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai penyedia modal ataupun melakukan kerja sama dengan pihak pemberi pinjaman untuk mengembangkan untuk memberikan permodalan kepada pelaku UMKM. Selain itu peran pemerintah dalam skema-skema kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skema yang dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyimpanan UMKM agar dapat di biyai dengan skema yang dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Berikutnya ialah peran teknis, terkait dengan peran ini pemerintah dapat melakukan pendampingan dalam menggunakan berbagai macam teknologi dalam menunjang kinerja para pelaku UMKM.

Disisi lain menurut Gede Diva (2003) dalam penelitian (Rahma, Kaukab, & Yuwono, 2020) disebutkan bahwasanya pemerintah memiliki tiga peran terhadap pelaku UMKM diantaranya berperan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Adapun yang dimaksud dengan peran fasilitator ialah memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pelatihan, penyediaan atau penambahan modal usaha, pendampingan, promosi produk atau pemasaran, dan lain-lain. Sementara itu, peran pemerintah sebagai regulator ialah meletakkan dasar-dasar atau kebijakan-kebijakan sehingga para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengembangkan usahanya. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga lingkungan atau persaingan usaha tetap kondusif. Selanjutnya ialah peran katalisator, adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa (Purba, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian filosofis post-positif yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami (bukan eksperimen) atau juga bisa disebut dengan metode penelitian yang bersifat naturalistic karena penelitian dilakukan secara ilmiah dan peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dikarenakan data penelitian lebih banyak menggunakan data-data deskriptif. Data-data deskriptif yang digunakan berupa perilaku, lisan ataupun kata-kata yang keluar dari orang-orang yang sedang yang diamati (Moelong, 2007).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui analisis kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM untuk kemudian menemukan inti dan fokus permasalahan yang diangkat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan deep interview atau wawancara yang mendalam dan observasi langsung dilapangan serta dokumentasi yang ada. Pemilihan informan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu oleh peneliti. Adapun informan yang dipilih untuk dilakukan wawancara adalah para staff desa serta pelaku UMKM yang ada di Desa Laut Dendang yang mempunyai kapabilitas untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut ini adalah informasi atau uraian mengenai data informan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.

Tabel. 1 Informasi Informan

Inisial Informan	Posisi/Jabatan
NI	Sekretaris Desa
ES	Kaur Umum
LS	Kaur Keuangan
TL	Kaur Perencanaan
YP	Pelaku UMKM

Operasionalisasi Variabel

Terdapat lima indikator kinerja merujuk kepada pendaat Dwiyanto dkk, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan mengacu pada teori Miles dan Huberman yang memuat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Langkah pertama setelah data diperoleh adalah melakukan reduksi atau dapat dikatakan meringkas, menentukan hal-hal yang utama dan yang dianggap penting, kemudian mencari tema serta pola datanya. Setelah itu melakukan penyajian data yang bertujuan agar sekumpulan informasi yang telah didapat dan disusun secara terstruktur bisa dipahami dengan mudah. Lalu masuk tahap akhir dengan melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa kinerja ialah sebagai sebuah pencapaian atas sasaran, tujuan atau target yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal ini, kinerja pemerintah desa ialah identifikasi atas mengenai proses hingga pencapaian hasil atas pelaksanaan program maupun kebijakan pemerintah desa. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dianalisis mengenai kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang. Yang mana dalam melakukan identifikasi serta analisis tersebut merujuk kepada lima indikator agar permasalahan penelitian yang dibahas akan dapat terjawab dengan gamblang. Lima indikator yang dimaksud ialah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Berikut ini akan diulas secara lebih rinci mengenai kinerja pemerintah Desa Laut Dendang atas data yang diperoleh melalui proses observasi lapangan, wawancara dan bukti dokumentasi yang ada.

Produktivitas

Produktivitas sebagai indikator atau tolak ukur dalam melihat kinerja pemerintah desa. Dimana produktivitas merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar pelayanan publik memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, atau dalam hal ini ialah pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam membersamai para pelaku UMK untuk meningkatkan kinerjanya sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dalam hidup mereka. Pendampingan serta dukungan pemerintah desa merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Dengan adanya motivasi, dorongan serta dukungan dari pemerintah desa, masyarakat khususnya dalam hal ini para pelaku UMKM akan merasa pemerintah hadir dalam membantu perekonomian mereka.

Kehadiran pemerintah dalam mendorong UMKM untuk terus bertumbuh dapat dilakukan dengan berbagai cara. Terlebih lagi pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran serta kemudahan dan berbagai kebijakan lainnya untuk terus mendorong UMKM agar mengalami kemajuan dan peningkatan. Sebagaimana temuan atas observasi serta wawancara yang dilakukan dilapangan, dapat dikatakan bahwasanya pemerintah Desa Laut Dendang telah melakukan pendampingan, pembinaan serta memberikan dukungan penuh kepada para pelaku UMKM di wilayah pemerintahannya. Adapun harapan atau hasil yang ingin dicapai terhadap para pelaku UMKM yang telah dilakukan pendampingan, pembinaan dan sebagainya ialah meningkatnya pendapatan yang mereka peroleh sehingga dengan demikian kesejahteraan mereka juga ikut meningkat. Namun dalam mencapai hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, berbagai tantangan dihadapi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga tujuan atau harapan yang ingin diwujudkan tidak terlalu tampak secara signifikan akan tetapi menunjukkan perkembangan. Terlebih lagi dalam kurun waktu dua tahun ini muncul tantangan baru yang tak terduga keberadaannya. Seluruh negara dari belahan dunia manapun dihadapkan dengan kemunculan pandemi Covid-19. Maka hal ini jelas berdampak langsung terhadap perekonomian dan kepada pendapatan para pelaku UMKM di Desa Laut Dendang yang turut mengalami penurunan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melakukan penyelamatan, diantaranya memberikan insentif BanPres produktif bagi para pelaku UMKM. Dalam hal ini terlihat kehadiran pemerintah Desa Laut Dendang dalam menyalurkan dan atau mendata masyarakat untuk memperoleh insentif tersebut telah terlaksana dengan baik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan elemen yang keberadaannya sangat penting dalam mengidentifikasi serta menggambarkan kinerja pemerintah desa. Kualitas layanan menjadi ukuran dalam menentukan kinerja pemerintah desa akan memperlihatkan bagaimana cara pemerintah desa dalam mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas layanan identik dengan kepuasan masyarakat. Maka apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kurang baik maka akan mendapat respon negatif dari masyarakat, begitu pula sebaliknya. Karena sejatinya pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugas serta fungsi atas jabatan yang dipegangnya dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Observasi dan wawancara telah dilakukan kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana pemerintah desa Laut Dendang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam melayani para pelaku UMKM yang terdapat di Desa Laut Dendang. Didapati bahwasanya masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Laut Dendang telah dilakukan cukup baik. Hal ini tercermin dari akses untuk memperoleh informasi didapatkan secara mudah. Dalam hal ini staff dari pemerintah desa selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang menyangkut kebutuhan ataupun segala sesuatu yang terkait dengan UMKM. Pembinaan juga dilaksanakan dengan baik, pelatihan dilaksanakan untk menambah wawasan serta keterampilan para pelaku UMKM khususnya dalam pengelolaan dana atau modal yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Dan yang patut diapresiasi ialah kedekatan para staff serta keramahannya terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Laut Dendang. Sehingga dengan begitu indikator kualitas layanan dikatakan baik dalam kinerja pemerintah Desa Laut Dendang.

Responsivitas

Dalam hal ini responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam menanggapi serta merealisasikan aspirasi maupun keluhan masyarakat. Pemerintah ialah tempat ditampungnya aspirasi masyarakat, dan pemerintah juga berkewajiban untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. sebagaimana diketahui bahwasanya pemerintah ialah pelayan publik, maka atas apapun yang

menyangkut kepentingan masyarakat harus direalisasikan. Akan tetapi dalam menampung serta merealisasikan aspirasi masyarakat tidak serta merta seluruhnya akan direalisasikan. Pemerintah harus menetapkan skala prioritas sebab ada hal-hal yang harus didahulukan tergantung kepada seberapa urgent kepentingan masyarakat tersebut untuk direalisasikan.

Dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan berbagai keluhan masyarakat para pelaku UMKM dalam menjalankan operasional usahanya. Berdasarkan wawancara serta pengamatan yang dilakukan bersama dengan staff desa, para pelaku UMKM dominannya mengeluhkan terkait dengan pengelolaan keuangan yang belum maksimal serta pemasaran produk yang dirasa masih belum terealisasi dengan baik. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pendanaan untuk peningkatan usahanya. Atas semua keluhan yang masyarakat laporkan kepada pemerintah desa kemudian dilakukan penjarangan, mana yang sifatnya sangat urgen maka itu yang didahulukan. Atas keluhan yang diungkapkan para pelaku UMKM tersebut, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menunaikan atau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Staff desa juga mengungkapkan bahwasanya dalam memenuhi aspirasi masyarakat tersebut pemerintah desa memberikan solusi berupa pelatihan atau workshop guna meningkatkan keterampilan serta pemahaman para pelaku UMKM baik dalam mengelola keuangan maupun permasalahan pemasaran. Dalam pelatihan ini, pemerintah menghadirkan orang yang memiliki kapabilitas serta kemampuan dibidangnya untuk kemudian menyampaikan kepada staff desa terkait dengan strategi serta hal-hal apa saja yang patut dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya pemerintah desa menyampaikan dan memberikan arahan serta bimbingan langsung kepada masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Kemudian dalam memperoleh pendanaan pemerintah desa menggaet lembaga perbankan serta penyedia jasa keuangan untuk memberikan solusi kepada masyarakat atas kesulitan permodalan yang dihadapi. Pada indikator responsivitas ini pemerintah desa telah melakukan kinerjanya dengan baik dengan bertindak responsif atas keluhan masyarakat yang menjadi permasalahannya.

Responsibilitas

Pemerintah desa telah memiliki tupoksi pada setiap masing-masing bagian. Maka siapapun yang telah dibebankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang telah diamanahkan kepadanya maka wajib untuk dilaksanakan semaksimal mungkin. Pekerjaan tersebut dilaksanakan baik dalam proses pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan. Adapun responsibilitas yang dimaksud dalam hal ini ialah tanggung jawab yang telah dibebankan pada masing-masing bagian untuk melaksanakan kinerjanya dengan semaksimal mungkin. Jadi dalam hal ini terdapat suatu bagian dalam pemerintahan desa yang ditugaskan atau diberikan tanggung jawab kepadanya untuk mengurus perihal terkait dengan UMKM. pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sangat bermanfaat yang bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih masalah pertanggungjawaban.

Pada pemerintahan Desa Laut Dendang sendiri, atas dasar pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan benar sekali bahwasanya sudah ditetapkan staff-staff dari pemerintahan desa yang bertindak untuk memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Dengan adanya pemisahan tugas seperti ini menjadikan pekerjaan lebih mudah dan masyarakat para pelaku UMKM juga dapat terkoordinir dengan baik. Atas dasar tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan para staff tersebut wajib menjalankan tugasnya mulai dari penyaringan aspirasi masyarakat atau keluhan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kemudian memusyawarakannya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM. Dan yang terakhir ialah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja kinerja serta kesejahteraan para pelaku UMKM. berdasarkan indikator responsibilitas ini terpantau kinerja pemerintahan Desa Laut Dendang telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah hal yang terkait dengan laporan pertanggungjawaba atas pelaksanaan program-program yang telah dijalankan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan atas pertanggungjawaban program-program serta kebijakan yang telah dijalankan. Laporan tersebut menunjukkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai. Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada atasan dalam pemerintahan tetapi laporan pertanggungjawaban juga wajib disampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban akan memperlihatkan transparansi atas pelaksanaan program-progra yang telah dijalankan pemerintah desa beserta dengan biaya yang dikeluarkan dalam menunjang program tersebut.

Pemerintahan baik tingkat atas hingga tingkat terkecilpun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar wawancara serta observasi yang telah dilaksanakan dilapangan jelas bahwasanya pemerintah Desa Laut Dendang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan program yang dilaksanakan dalam menunjang kinerja para pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Atas seluruh program yang telah dilaksanakan masyarakat juga mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut walaupun tidak secara resmi. Atas indikator akuntabilitas ini pemerintah Desa Laut Dendang telah melaksanakan kinerjanya dengan baik dengan menyampakan laporan pertanggungjawaban atas setiap program yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas para pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapati bahwasanya kinerja pemerintah Desa Laut Dendang yang diukur dengan lima indikator yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas secara akumulatif menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja dengan indikator produktivitas sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi terdapat sejumlah kendala dalam mewujudkan harapan atau target yang telah ditetapkan. Harapan atas meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM belum dirasakan secara signifikan akan tetapi tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Sementara itu kualitas layanan sudah menunjukkan kepuasan dimasyarakat. Responsivitas juga dinilai baik dengan disaringnya aspirasi dan didengarkannya keluhan atas kesulitan yang dirasakan para pelaku UMKM dan kemudian diberikan solusi serta pendampingan dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian responsibilitas ditandai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dikhususkan untuk menangani permasalahan UMKM yang ada di Desa Laut Dendang. Lalu akuntabilitas yang ditunjukkan dengan laporan pertanggungjawaban atas setaip program-program serta kebijakan pemerintah desa yang terkait dengan penanganan permasalahan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, M., & Tarigan, U. (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 87-100. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i2.557>

Arjawa, I. G. W., & Senimantara, I. N. (2022). Determinan Kesejahteraan Pelaku Umkm Kerajinan Di Kota Denpasar. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.551>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1099/1/tabel-perkembangan-umkm.html>

- Fitriana, E. N., & Eprilianto, D. F. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Dalam Upaya Memajukan UMKM Desa di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 10(4), 1201–1214.
- Harahap, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Analisis Kinerja Dan Strategi Pengembangan Umkm Alas Kaki Di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 4(3), 435. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4232>
- Kusnaendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–8.
- Maulida, S., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197. Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155>
- Moelong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>
- Purba, G. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 191–200. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Putra, A. H. (2018). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Rahma, I., Kaukab, M., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm. *Jurnal CAPITAL*, 3(2), 30–50.
- Ramadhan, R. (2018). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi: Dinas Koperasi dan UKM ... (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/3293/1/SKRIPSI.pdf>
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 106–120.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335. <https://doi.org/10.19184/BISMA.V11i3.6474>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.31002/REP.V4i2.1952>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved August 20, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Wauran, P. (2012). Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 7(3). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/45004/>